

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Mutu Manajemen

1. Pengertian Mutu Manajemen

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Mutu adalah ukuran baik dan buruknya suatu keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya). Sedangkan menurut Nurhayati (2010:84) mutu merupakan kesesuaian antara kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen, di dalam sebuah lembaga pendidikan yang bermutu sudah pasti dapat menguasai pasar dengan hasil produksinya yang telah sesuai dengan keinginan pasar karena itu konsumen menjadi puas, jika konsumen sudah merasa puas maka mereka akan setia dalam lembaga pendidikan tersebut dan bahkan konsumen akan mempromosikan secara tidak langsung dengan sesama temannya.

Mutu dapat dilihat dari dua sisi yaitu normatif dan deskriptif (Oemar: 1990: 33) di dalam normatif mutu merupakan unsur ekstrinsik dan instrinsik, berdasarkan kriteria ekstrinsik mutu merupakan instrumen untuk mendidik, dan tenaga kerja yang terlatih, sedangkan instrinsik yaitu produk dari lembaga pendidikan yang telah di didik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan deskriptif yaitu mutu yang dihasilkan dari hasil tes pelajarannya. Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa mutu adalah sebuah proses yang terstruktur sehingga menghasilkan produk yang diinginkan.

Menurut Sadiliy (2003: 372) Manajemen secara etimologi berasal dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus, mengatur, mengelola dan melaksanakan. Sedangkan secara terminologi manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, penggerak sumber daya manusia dan sumber daya lainnya guna mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Manajemen yang baik adalah manajemen yang sesuai dengan konsep, objek dan tidak menyimpang, manajemen itu harus fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kondisi apapun.

Mutu menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan, bahkan kita semua mengakui saat ini memang ada masalah dalam sistem pendidikan. Lulusan sekolah madrasah jika tidak siap dalam memenuhi kebutuhan masyarakat maka ini akan menjadi masalah. Jika peserta didik tidak siap bertanggungjawab dan produktif maka akhirnya akan menjadi sebuah beban. Peserta didik yang seperti itu adalah sebuah produk pendidikan yang tidak terfokus pada mutu.

Menurut Lahmudin Lubis (2014:16) mengategorikan alasan pokok rendahnya kualitas pembelajaran di Indonesia ke dalam tiga bagian, pertama pendekatan yang digunakan lebih terpusat untuk *input-output* dan sangat kurang minat pada prosesnya. Kedua, pelajaran dilakukan secara birokrasi sentralistik, di dalam bagian bidang tertentu sentralistik masih wajib tetapi dalam periode daerah pendekatan desentralistik lebih dominan. Ketiga kontribusi peserta didik khususnya guru, masyarakat, orang tua siswa sangat kurang.

Dari beberapa pengertian mutu menurut para ahli di atas dapat disimpulkan mutu adalah ukuran yang dibuat oleh konsumen atau pelanggan atas produk dilihat dari segala dimensi untuk memenuhi tuntutan kebutuhan, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan konsumen.

Di dalam dunia pendidikan mutu sebagai sebuah filosofi dan metodologi yang membantu sekolah merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Rumusan mutu bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dirujuk pada kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, fasilitas belajar dan pembelajaran, sarana prasarana, tenaga pendidikan sesuai dengan kesepakatan. Ada juga hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana mutu dapat diterapkan pada setiap proses pendidikan mulai dari pengelolaan fungsi, sekolah dikatakan bermutu apabila prestasi sekolah khususnya peserta didik menunjukkan prestasi akademik, memiliki nilai kejujuran, memiliki tanggung jawab, dan memiliki keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterima sekolah.

Mutu merupakan kecocokan atau kesesuaian suatu produk dengan standar tertentu dan harapan konsumen, mutu juga mencakup ke dalam 3 bagian yaitu:

- a. Mutu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
- b. Mutu mencakup produk tenaga kerja, proses dan lingkungan.
- c. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah.

Untuk mendefinisikan mutu atau kualitas memerlukan pandangan yang komprehensif. Ada beberapa elemen bahwa sesuatu dikatakan berkualitas, yaitu:

- a. Kualitas meliputi usaha memenuhi harapan pelanggan.
- b. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
- c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah-ubah, karena yang berkualitas saat ini belum tentu berkualitas di waktu yang lain.
- d. Kualitas merupakan suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia yang memenuhi harapan pelanggan.

Husaini Usman (2013:5) menjelaskan bahwa: secara bahasa, manajemen dari bahasa Latin yaitu *manus* yang artinya tangan dan *agere* yang artinya melakukan. Kemudian kedua kata tersebut digabung menjadi satu kata menjadi *managere* yang berarti menangani. *Managere* dalam Bahasa Inggris *to manage, management* dan *manager* bagi pelaku yang melakukannya. *Management* diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya manajemen atau pengelolaan. Dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar sangat diperlukan seorang pemimpin yang dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar efektif serta dapat bertanggung jawab untuk memimpin sekolah sebagai lembaga pendidikan.

Horold Kontz dan Cril O'Donnel dalam buku Nur Zazin (2011:27-28) mengatakan bahwa manajemen merupakan sebuah usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan kegiatan orang lain, seperti seorang manajer mengadakan koordinasi sejumlah pekerjaan dengan bawahannya yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengendalian. Sementara menurut Sayyid Mahmud al-Hawariy dalam bukunya *al-Idaroh Ushul wal Ushushil Ilmiyah*

menjelaskan bahwa manajemen itu suatu sikap seseorang untuk mengetahui apa yang akan dituju, hal-hal apa yang akan menjadi hambatan, solusi apa yang nantinya dijadikan jalan keluar, maka dengan itu sebaik-baiknya gunakanlah waktu dengan tepat sehingga tidak pemborosan waktu dalam mengerjakannya.

George R. Terry dan Leslie W. Rue (2008:1) manajemen adalah sebuah proses kerangka kerja yang di dalamnya terdapat arahan dan bimbingan pada sebuah kelompok untuk mencapai tujuan atau pernyataan yang nyata. Sedangkan menurut Terry (1993:9) yang dikutip oleh Syafaruddin (2005:6) manajemen merupakan sebuah kegiatan dimana yang mengerjakannya disebut manager. Seorang manager menanggapi tugas yang bersifat "*managerial*" yang penting untuk melaksanakan segala sesuatu seorang diri demi mencapai upaya yang terbaik melalui manajemen yang telah di tetapkan sebelumnya.

Menurut Stoner dalam Susatyo Herlambang (2013:4) mengartikan "manajemen merupakan kemampuan atau ketrampilan pribadi. Proses tersebut terdiri beberapa proses manajemen yaitu perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan". Sedangkan Oemar Hamalik menjelaskan bahwa "manajemen adalah suatu proses yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia lain serta menggunakan sumber-sumber lainnya, menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya." (Oemar, 2006:28).

Dakir (2019:1) menjelaskan bahwa: manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, pemimpinan, dan pengontrolan untuk optimasi penggunaan sumber-sumber dan pelaksanaan tugastugas dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah interaksi untuk mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui individu dan aset hierarkis lainnya.

Dalam studi administrasi, ada berbagai perspektif yang mencoba membentuk makna dewan, karena tidak sulit untuk memberikan makna luas yang dapat diakui oleh semua orang. Papan sering dicirikan sebagai ilmu

pengetahuan, tip, dan pemanggilan. Dikatakan sebagai ilmu, karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan mengatur orang lain menjalankan tugas (Sunhaji, 2008: 9).

Dengan demikian manajemen dapat diartikan sebagai proses suatu kelompok secara kerjasama untuk mencapai tujuan secara setuju bersama. Proses tersebut menggabungkan prosedur yang digunakan oleh pengawas untuk mengatur latihan atau latihan orang lain menuju pencapaian tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya lainnya.

2. Tujuan Mutu Manajemen

Mutu manajemen memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat tercapai di dalam prosesnya yaitu:

- a. Menetapkan visi, misi dan standar kerja pada semua anggota di dalam lembaga pendidikan.
- b. Membangun motivasi dan budaya kerja di dalam lembaga pendidikan.
- c. Membantu meningkatkan kepercayaan terhadap hasil kerja anggota.
- d. Memberikan inovasi atau pengembangan buat para guru dan stake holder agar memiliki skill lebih baik lagi.

3. Manfaat dan Fungsi Mutu Manajemen

- a. Manfaat mutu manajemen

Mutu manajemen memberikan jaminan pada pelanggan bahwa sebuah lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab tentang kualitas dan kemampuan dalam menyediakan produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Mutu manajemen yang efektif akan dapat memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan yang baik. Berikut manfaat menurut faure (1999).

b. Fungsi mutu manajemen

Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa mutu memiliki fungsi sebagai sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang diberikan oleh suatu organisasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja seluruh anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan visi dan misi dari sebuah lembaga pendidikan.

4. Ruang Lingkup Mutu Manajemen

Ada beberapa ruang lingkup mutu manajemen yaitu:

- a. Sebuah lembaga pendidikan yang menginginkan keunggulan melalui implemetasi suatu sistem mutu manajemen.
- b. Sebuah lembaga pendidikan yang menginginkan keyakinan bahwa mereka akan memenuhi syarat.
- c. Memiliki kepentingan yang saling pengertian dalam mutu manajemen.
- d. Di dalam atau di luar lembaga pendidikan yang ingin mengakses mutu manajemen dapat dilakukan.
- e. Pengembangan standar terkait dengan mutu manejemen. (Nasution, 2005:78)

5. Total Quality Management di Lembaga Pendidikan

Mutu Terpatu atau disebut juga *total quality management* dapat didefenisikan menjadi 3 kata yaitu: *total* (keseluruhan), *quality* (kualitas, derajat/tingkat keunggulan barang atau jasa), *management* (tindakan, seni, cara menghendel, pengendalian, pengarahan). Dari ketiga kata tersebut dapat dijelaskan bahwa TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan kegiatan yang dilaksanakan melalui perbaikan yang berkelanjutan dan memotivasi pada pesertanya.

Total Quality Management adalah salah satu model atau metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan. karena *total quality mangement* lebih mengedepankan integrasi dari semua

fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada pada lembaga pendidikan tersebut. *Total quality management* adalah Kualitas pendidikan sangat penting dalam meningkatkan mutu manajemen dalam sebuah lembaga pendidikan. karena mutu manajemen harus terukur berdasarkan tujuan nyatanya dari pada subjektifnya. Oleh karena itu kualitas pendidikan adalah kemampuan pengetahuan yang dimiliki madrasah untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

TQM awalnya dikembangkan dalam dunia industri yang selanjutnya dijabarkan dan diaplikasikan menjadi TQM di dunia pendidikan (Prabowo, 2012:72). Kalau untuk di lembaga pendidikan agar dapat mencapai madrasah yang bermutu harus ada tindakan yang dilakukan sehingga terjadi inovasi untuk menjadi madrasah yang berbeda dari madrasah lainnya. Menurut Edward TQM adalah suatu standar mutu dalam pendidikan. Ia memberikan sebuah filosofis untuk memperbaiki mutu dengan pencapaian dengan ide sentral yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan (Sallis, 2010:23). Menjaga mutu dalam lembaga pendidikan sangat penting bukan hanya menyangkut *input*, *output* dan *outcome* tetapi mutu manajemen sebuah madrasah agar banyak masyarakat yang berniat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah madrasah.

Tabel 1

Unsur, *input*, proses, *output*, pendidikan berdasarkan mutu.

| No. | Mutu Pendidikan | Pengertian | Unsur |
|-----|-----------------|--|--|
| 1. | <i>Input</i> | Segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses | 1. Sumber daya manusia seperti kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik, konselor, <i>stake holder</i> , dan peserta didik. 2. Sumber daya lainnya yaitu peralatan dan perlengkapan. 3. Perangkat lembaga: struktur |

| | | | |
|----|---------------|--|---|
| | | | <p>organisasi sekolah, peraturan undang-undang, deskripsi tugas, rencana dan program pembelajaran.</p> <p>4. Harapan: visi, misi, dan tujuan yang akan di capai.</p> |
| 2. | Proses | Merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. | Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses <i>monitoring</i> dan evaluasi. |
| 3. | <i>Output</i> | Sesuatu hasil yang merupakan kinerja sekolah. kinerja sekolah seperti prestasi sekolah yang dihasilkan dari poses perilaku | Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitas, efektifitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, dan moral. |

Total quality management dalam konsep pendidikan Islam merupakan realisasi dari ajaran *ihsan*, yakni berbuat baik kepada semua orang, karena kalau kita berbuat baik maka Allah swt akan memberikan nikmat-Nya dan segala larangan-Nya kita jauhi. Kata *ihsan* disini menunjukkan bahwa kualitas atau mutu adalah sesuatu yang baik dan indah. Seperti dalam firman Allah swt

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qashas: 77)

Maka dari itu konsep manajemen mutu dalam pendidikan Islam yaitu segala sesuatu yang dikatakan bermutu jika memberikan kebaikan, baik itu kepada lembaga pendidikan, kepada orang lain, *stake holder*, peserta didik. Menurut Nasution (2005: 28) Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan pendidikan. kepuasan pelanggan dalam lembaga pendidikan yaitu masyarakat terhadap output yang dihasilkan dari lembaga pendidikan tersebut. Menurut Nasution dalam bukunya Manajemen Mutu Terpadu mengatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang berfokus pada semua orang dengan tujuan untuk terus menerus meningkatkan nilai yang diberikan kepada pelanggan dengan memerlukan komitmen semua organisasi seluruh aspek manajemen organisasi. Maka dari itu Kepala Madrasah, guru, *stake holders*, siswa harus bekerja sama dalam meningkatkan mutu manajemen di lingkungan madrasah dengan tujuan peningkatan mutu dan kualitas baik dalam layanan pendidikan maupun lulusan yang berkualitas.

Peningkatan mutu pendidikan harus ditingkatkan terus menerus dan berkesinambungan. *Total Quality Management* juga merupakan manajemen kualitas yang menyeluruh dan sebuah strategi manajemen yang ditunjukkan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua komposisi dalam organisasi. Sesuai dengan definisi ISO. *Total quality management* adalah suatu administrasi untuk berurusan dengan organisasi yang berfokus pada kualitas. Mengingat investasi masing-masing individu berfokus pada pencapaian jangka panjang melalui loyalitas konsumen dan memberikan keuntungan kepada semua individu di organisasi dan masyarakat. TQM juga salah satu model atau metode yang digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, karena pendidikan salah satu kunci paling efektif untuk mencapai tujuan pendidikan.

Meningkatkan kualitas pendidikan itu memang sebuah keharusan yang dilakukan untuk. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan niscaya yang harus dilakukan di dunia pendidikan. seiring dengan majunya perkembangan

teknologi maka kehidupan sosial, budaya dan ekonomi semakin tidak dapat dibatasi, menjaga mutu pendidikan itu sangat penting baik dalam dunia pendidikan, persoalan mutu bukan hanya sekedar *input*, *output*, *outcome*. *Input* pendidikan yang bermutu adalah pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, dan perangkat pembelajaran, *output* yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi, sedangkan *outcome* yang bermutu adalah lulusan yang mampu bersaing di dunia pendidikan yang lebih tinggi.

Total Quality Management merupakan salah satu kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan pendidikan yang paling efektif. Karena TQM lebih mengedepankan integrasi dari semua fungsi dan proses serta memberdayakan dan melibatkan semua unsur yang ada di dalam lembaga pendidikan. TQM harus dilakukan terus menerus demi tercapainya tujuan pendidikan yang memberikan kepuasan kepada peserta didik. Dalam mewujudkan TQM dalam lembaga pendidikan membutuhkan kerja sama yang keras atau bersungguh-sungguh, melakukan perbaikan terus menerus, adanya standar mutu, adanya perubahan budaya dan kultur.

Prosedur dalam mengimplementasikan TQM pada dasarnya menempuh tiga tahapan yaitu:

a. Persiapan

Tahap ini merupakan tahap yang pertama yang harus dilakukan sebelum TQM dikembangkan dan dilaksanakan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu membentuk sebuah tim, dan melaksanakan pelatihan TQM bagi tim tersebut. Penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk mutu serta penerapan sistem.

b. Pengembangan mutu

Setelah melakukan persiapan, maka pengembangan mutu hal yang harus dilakukan yaitu meninjau pengembangan model atau sistem yang sudah ada melalui penyusunan kualitas, seperti melakukan pelatihan dan teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi standar mutu tertentu.

c. Penjaminan mutu

Semua tindakan terencana secara sistematis yang mengimplementasikan guna memberikan kepercayaan bahwa produk memenuhi mutu tertentu. Tahap implementasi ini menunjukkan bahwa melakukan uji coba sistem jaminan mutu dalam lingkup lembaga pendidikan.

TQM menginginkan adanya *improve* dalam semua hal, baik dalam meningkatkan kualitas dalam manajerial. Meskipun konsep tersebut cenderung pada pengelolaan keuangan dan *financial* namun dapat juga diartikan dalam pendidikan. Intinya bahwa perbaikan mutu sangat penting secara terus menerus. TQM sebenarnya dikembangkan dari pemikiran sistem *thinking* yang awalnya di dunia industri yang selanjutnya diaplikasikan di dunia pendidikan. manajemen mutu yang dikembangkan di dunia pendidikan merupakan model berdasarkan aplikasi *thinking* yang menekankan ke segala sesuatu harus dilihat dari kebutuhan yang dipadukan.

B. Mekanisme Pembiayaan Pendidikan

1. Pengertian Mekanisme

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan (KBBI: 2000:43). Menurut Lorens (2010:06), mekanisme pada dasarnya sebuah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani yaitu kata "*Merchos*" yang artinya sebuah metode, sarana dan teknis untuk menjalankan suatu fungsi.

Sedangkan menurut Galileo (2018:120) menjelaskan bahwa mekanisme semua gejala yang dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik (mesin), atau semua peristiwa yang hasil dari materi yang bergerak dapat dijelaskan menurut kaidahnya. Mekanis dapat diartikan dalam banyak pengertian ada 4 yang menjelaskan tentang mekanisme yaitu: (moenir, 2013:53)

- a. Mekanisme adalah pandangan sebuah interaksi-interaksi dari bagian-bagian dalam suatu sistem tanpa disengaja menghasilkan kegiatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
- b. Mekanisme adalah teori semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.
- c. Mekanisme merupakan sesuatu teori gejala alam bersifat fisik dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material yang bergerak.
- d. Mekanisme ialah suatu upaya memberikan penjelasan mekanis yakni yang bergerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak bisa berubah bagi struktur internal benda alam dan bentuk seluruh alam.

Menurut Amalia (2013:53) mekanisme adalah suatu rangkaian kerja sebuah alat untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja untuk mengurangi kegagalan sehingga menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi dari banyak pengertian di atas menurut para ahli maka mekanisme dapat disimpulkan bahwa serangkaian alat yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan proses kerja serta interaksi setiap personal atau kelompok.

Agar tidak salah memahami disini penulis menjelaskan bahwa mekanisme ini digunakan untuk penetapan pembiayaan pendidikan di madrasah, sehingga mengetahui cara atau sistem yang digunakan semua personal maupun kelompok di madrasah memahami mekanisme pembiayaan pendidikan dan sebagai penunjang agar mutu manajemen setiap madrasah dapat lebih baik lagi.

2. Pengertian pembiayaan pendidikan

Pembiayaan pendidikan sebagaimana yang telah di disebutkan dalam standar Nasional Pendidikan: PP RI No. 19 Tahun 2005 pembiayaan pendidikan terdiri dari tiga bagian yaitu: biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal.

- a. Biaya investasi merupakan biaya untuk pengadaan bagian sarana prasarana, sumber daya manusia dan modal kerja.
- b. Biaya operasional yaitu biaya yang dikeluarkan oleh siswa dan lembaga pendidikan untuk kegiatan sehari-hari sesuai kebutuhan agar proses pembelajaran tetap berlangsung.
- c. Biaya personal meliputi:
 - 1) Gaji guru dan stake holder
 - 2) Perlengkapan sekolah yang habis
 - 3) Listrik, air, uang lembur dan lain sebagainya.

Hal yang sama juga di kemukan oleh Amiruddin Siahaan (2021:972) pembiayaan pendidikan merupakan pengeluaran dalam bentuk sumber daya manusia mau itu dalam bentuk barang atau benda yang digunakan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekolah seharusnya memang harus memiliki dana yang cukup karena untuk menyediakan kebutuhan sekolah yang terus menerus, maka dari itu sekolah harus menghimpun dana, mengelola dana, mengalokasikan dana, untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Pembiayaan pendidikan disekolah harus dikelola secara transparan agar lebih efektif dan efisien sehingga tidak ada lagi orang lain yang berprasangka buruk.

Menurut E. Mulayasa (2011:48) sumber keuangan dan pembiayaan sekolah dapat dikelompokan atas tiga sumber yaitu pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, orangtua atau peserta didik, masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat. Lebih rinci lagi menurut Dedi Supriadi (2006: 219) mengelompokan sumber pembiayaan sekolah menjadi empat yaitu subsidi pemerintah, kontribusi masyarakat, sumbangan lainnya, keluarga siswa.

Cohn & Geske (2004:70) menyatakan bahwa biaya pendidikan tidak hanya pengeluaran, tetapi termasuk biaya kesempatan yang beberapa

diantaranya merupakan biaya implisit. Sependapat dengan ini, Mulyono (2010:155) menyatakan bahwa biaya pendidikan bukan hanya berbentuk uang, melainkan juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*) yang sering disebut *income forgone*, yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pelajaran atau menyelesaikan studi.

Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan Pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Biaya pribadi peserta didik merupakan biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Menurut Armida, (vol 26 No. 1; 2011) model pembiayaan pendidikan memiliki dua sisi yaitu pengalokasian dan penghasilan, seperti yang dikatan oleh Jhon S. Mrophet pada dasarnya pembiayaan pendidikan dikalsifikasikan menjadi dua model yaitu *flat grand model* dan *Equalization model*. Semua biaya yang dihasilkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumbangan, subsidi, itu pengelolaannya harus akuntabilitas sehingga tidak ada yang di diskriminatif terhadap anggaran biaya yang diperlukan untuk masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Menurut firdaus (2004: 27) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sistem pembiayaan pendidikan yang efektif akan dapat mewujudkan lembaga pendidikan yang bermutu dan menjamin kelangsungan hidup madrasah.

Dalam pembiayaan pendidikan memberikan kontribusi positif bagi lembaga pendidikan untuk memenuhi kelengkapan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti semakin besar yang di dapat atau yang dikeluarkan orangtua peserta didik maka setidaknya menunjukkan partisipasi dalam mendorong meningkatkan kualitas pendidikan. sebagai mana dijelaskan dalam firman Allah swt dalam Q.S Al-mujadilah ayat 12-13:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٢ ءَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ فَإِذَا لَمْ
تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ □ ١٣

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu. yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih; jika kamu tidak memperoleh (yang akan disedekahkan) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum Mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S AL-Mujadilah: 12-13)

Dengan demikian, peran serta semua yang berkaitan decara aktif dalam pembiayaan pendidikan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan untuk diwujudkan serta memiliki peran serta dalam peningkatan mutu manajemen melalui mekanisme pembiayaan pendidikan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoensia (Depdiknas, 2008: 1548) pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Sedangkan menurut Mulyono (2010: 167) pembiayaan merupak bagaimana mencari dana atau sumber dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut dengan memanfaatkan rencana biaya stadar, modal dan kebutuhan yang akan datang.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayan pendidikan yaitu suatu proses dimana pendapatan dan sumber daya tersedia untuk digunakan dan untuk menyusun serta menjalankan program kegiatan yang akan dilakukan di dalam lembaga pendidikan. sehingga dana yang di kumpulkan dapat memfasilitasi setiap kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, dan berbagai keperluan yang dibutuhkan.

Menurut Akdon (2017:9) Pembiayaan pendidikan memiliki beberapa faktor yaitu besar kecilnya lembaga pendidikan, jumlah peserta didik, tingkat

honor guru, karena berpengaruh dengan keefektifan kinerja, rasio antar peserta didik dengan guru, serta penggajian dan pendapatan. Sedangkan menurut Daryanto (2001: 1-2) melihat dari sudut pandang ekonomi bahwa tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Karena biaya itulah dapat memenuhi kebutuhan yang berkenaan dengan proses berlangsungnya pembelajaran. Dan pembiayaan pendidikan juga menyangkut sumber-sumber biaya baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat, jika dilihat dari segi pendidikan pembiayaan pendidikan berhubungan dengan jumlah pembiayaan sekolah swasta, penggajian, pembiayaan dan pendapatan.

Kesadaran pemerintah, masyarakat serta wali siswa untuk menanggung biaya pendidikan merupakan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan sektor publik melayani masyarakat dengan berbagai cara baik itu pengajaran, bimbingan, pelatihan dan lain sebagian. Berbagai upaya dalam mencapai tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif dan kualitatif tetap saja pembiayaan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan menentukan. Maka dari itu pendidikan tanpa biaya yang memadai maka tidak akan berjalan sesuai harapan yang diinginkan.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam lembaga pendidikan tentang manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan. oleh karena itu pembiayaan pendidikan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. ketidak mampuan lembaga pendidikan menyediakan biaya maka akan menghambat proses belajar mengajar. Namun bukan berarti bahwa tersedia biaya yang berlebih akan menjamin pengelolaan sekolah akan lebih baik.

Pada tingkat sekolah pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat dan daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejahtera ini tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Tingginya biaya pendidikan yang ditanggung oleh orangtua seperti transport ke sekolah, iuran SPP, pembelian seragam, dan kelengkapan lainnya.

Sedangkan yang dari pemerintah di alokasikan untuk penyediaan sarana prasarana, gaji guru, pengembangan fisik sekolah dan lain sebagainya.

3. Sumber Dana Pembiayaan Pendidikan

Tidak dapat dipungkiri pendidikan memerlukan pembiayaan pendidikan yang tidak sedikit, baik itu untuk pembangunan, pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan peralatan, serta untuk biaya operasional madrasah. Jika semua itu tidak didukung oleh pembiayaan anggaran pendidikan, maka tidak akan berjalan sesuai mestinya. Semakin besar enggaran pmbiaayaan pendidikan maka akan semakin meningkat kualitas pendidikan yang akan di capai. Tetapi tidak heran biaya pendidikan di madrasah masih minim sehingga untuk pendidikan di madrasah yang berbasis pendidikan Islam masih ketinggalan dengan pendidikan di sekolah negeri yang notabennya pendidikan umum. Dapat dilihat dari gedung sekolah, madrasah memiliki gedung yang dapat dikatakan hanya memiliki standar kelayakan minimal.

Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam APBN dan APBD

Kebijakan negara yang mengalokasikan 20 % APBN untuk pendidikan tidak serta merta menjadikan madrasah swasta lebih baik. bahkan sebaliknya dalam beberapa hal, kebijakan pendidikan gratis justru menyulitkan madrasah swasta untuk berkembang. bantuan operasional Siswa (BOS) yang menjadi dasar kebijakan pendidikan gratis ternyata pada prakteknya lebih banyak mencover operasional pendidikan yang bertujuan langsung kepada kebutuhan siswa, sementara masalah fundamental madrasah swasta, yaitu insentif guru berupa gaji dan honor guru madrasah swasta tidak difikirkan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah dengan berperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis

masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Belum lagi kebijakan desentralisasi pendidikan dengan menyerahkan pembinaan sekolah ke pemerintah daerah telah menyebabkan polarisasi atau pengkutuban antara sekolah dengan madrasah. Dampak yang paling kelihatan adalah adanya perbedaan tingkat kesejahteraan antara guru sekolah dengan guru madrasah. Kebijakan ini masih mengesankan menciptakan suasana diskrimatif perlakuan pemerintah daerah terhadap sekolah dengan madrasah. guru-guru sekolah mendapatkan kesejahteraan tambahan dari pemerintah daerah, sedangkan guru madrasah tidak mendapatkan bantuan kesejahteraan. Di satu sisi, UU Sisdiknas no. 20/2003 menyiratkan semua kegiatan penyelenggaraan pendidikan dituntut melakukan desentralisasi, tetapi di sisi lain UU Pemerintahan Daerah no. 22/1999 menyuratkan bahwa bidang agama tidak termasuk bidang yang didesentralisasikan.

Pada umumnya pendidikan yang memiliki standar minimal maka akan menghasilkan siswa yang berpengetahuan minimal di dalam pendidikan. Alokasi anggaran 20% yang berasal dari APBN dan APBD belum dapat memadai antara madrasah dengan sekolah negeri, karena selama ini alokasi dana lebih menggunakan sekolah negeri. Menurut Harsono sumber biaya pendidikan terbagi menjadi empat bagian yaitu pemerintah, orangtua siswa, masyarakat, dan lembaga itu sendiri (Harsono, 2009:9).

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan) pembiayaan pendidikan diperoleh dari hibah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan uang sekolah dan kontribusi masyarakat. Untuk rencana pendapataan dan belanja sekolah (RAPBS) sebagian besar dari belanja pendidikan tingkat sekolah berasal pemerintah pusat sedangkan sekolah swasta berasal dari siswa dan yayasan.

Menurut Supriadi (2003:5-6) Dalam dimensi sumber – sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi menjadi 4 kategori yaitu:

- a. Hasil dari pemerintah merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan, karena termasuklah di dalamnya ada biaya

dari pajak, bantuan dari luar negeri ataupun pinjaman dari pemerintah.

- b. Hasil khusus untuk pendidikan pinjaman dari luar negeri yang diperuntukan untuk pendidikan.
- c. Uang sekolah yaitu uang yang dibayarkan langsung dari orangtua siswa kepala bendahara sekolah.
- d. Sumbangan sukarela yang dilakukan perseorangan baik itu berupa uang tunai, bahan, barang, jasa yang dikumpulkan secara suka rela.

Ada juga bantuan dari pemerintah misalnya menempatkan guru negeri sebagai tenaga pendidik, uang rutin untuk kebutuhan rutin. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan tidak hanya bersumber dari pemerintah pusat dan daerah tetapi juga dari orangtua dan sumbangan suka rela.

Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari peserta didik merupakan potensi besar dalam melaksanakan merupakan potensi besar dalam melaksanakan manajemen pembiayaan pendidikan yang merupakan modal bagi kelangsungan pendidikan, sistem pengelolannya pun difokuskan pada upaya strategi kemitraan.

Dalam undang – undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 ditegaskan secara jelas bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya manusia pendidikan dilakukan oleh semua pihak termasuk di dalam pemerintahan, masyarakat dan orangtua/keluarga peserta didik untuk mempermudah dalam memberikan kesempatan belajar bagi semua orang. Adapun sumber biaya pendidikan disekolah yaitu dana pemerintah, iuran SPP, sumbangan sukarela dari masyarakat dan perusahaan.

Terdapat tiga sumber pembiayaan pendidikan menurut sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 46 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat

Sebagian dari keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang harus di keluarkan Negara untuk pembiayaan pendidikan sebesar 20% yang digunakan untuk:

1) Dana Bantuan Operasional Madrasah (BOM)

BOM merupakan bantuan yang diberikan pemerintah untuk membantu penyediaan pembiayaan pendidikan atau biaya operasional dan nonpersonalia sekolah. Penyaluran dan pengelolaan BOM wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana BOM. Teks penggunaan dana BOM diterbitkan oleh Kemendikbud dan Kemenag karena mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program BOM (Mulyono, 2015: 170). Ada beberapa pengalokasian dana BOM diperuntukan untuk: pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengelolaan sekolah, pembayaran honor dan pembelian dan perawatan sarana prasarana.

2) Dana Alokasi Umum Pendidikan (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, saat ini DAU tambahan untuk bantuan dana kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan gaji ke 13 dan tambahan untuk bantuan kelurahan.

3) Dana Alokasi Khusus Pendidikan (DAK)

Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Adapun program yang menjadi prioritasnya pendidikan, kesehatan, pertanian, kehutanan, perdagangan sarana prasarana daerah tertinggal dan lain sebagainya.

b. Pemerintah Daerah

Peranan pendapatan asli daerah masih relatif kecil dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah. Padahal PAD merupakan salah satu komponen pendapatan daerah untuk pelaksanaan otonomi. APBD dalam bidang pendidikan digunakan untuk beasiswa, honor, fasilitas sarana prasarana.

c. Masyarakat

Pembiayaan pendidikan yang berasal dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam lembaga pendidikan seperti iuran spp, sumbangan yang siperuntukan untuk melengkapi keperluan peserta didik seperti ATK, seragam, buku dan lain sebagainya.

4. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu langkah strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan. pada kebijakan sekolah perlu adanya strategi untuk mengatasi masalah-masalah uang dihadapi dan mengoptimalkan sumber sana yang tersedia agar kegiatan-kegiatan sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk melakukan pengelolaan pembiayaan sekolah, Dedy Achmad Kurniady (2011:2) mengemukakan unsur-unsur pokok model pengelolaan pembiayaan sekolah dasar berdasarkan kebutuhan belajar, yaitu:

- 1) Program atau kegiatan, unsur ini merupakan dasar dalam mencapai tujuan PBM, serta untuk menentukan pendistribusian dan pengalokasian dana secara efektif dan efisien;
 - 2) distribusi dan alokasi dana, unsur ini merupakan pedoman bagi sekolah dalam mendistribusikan dan mengalokasikan dana yang diperoleh untuk dipergunakan secara efektif dan efisien dalam melaksanakan PBM;
 - 3) sumber dana, unsur ini memberikan gambaran tentang darimana sekolah mendapatkan sumber-sumber pembiayaan;
- a. Prinsip-prinsip Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan di Sekolah

Sebagai pengurusan dan pertanggung jawaban ada beberapa langkah penggunaan anggaran dan keuangan sekolah yaitu sebagai berikut:

- 1) Digunakan dengan hemat, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan
- 2) Terkendali dan terarah sesuai dengan program yang sudah ditetapkan.
- 3) Terbuka dan transparan, sehingga tau digunakan untuk apa dan dari mana dana itu di dapat. Serta memberikan bukti pertanggung jawaban dan bukti pemakaian.

b. Perencanaan Keuangan Sekolah

Menurut Danimiharja peran anggaran dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan berkaitan dengan mutu manajemen sekolah karena secara keseluruhan sangat penting untuk mencapai sebuah tujuan (Mintarsih, 2004:36) anggaran di dalam satu periode salah satu pedoman operasional sekolah, proses penyiapan anggaran harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan di capai. Karena penganggaran ini merupakan instrument untuk memfasilitasi sebuah proses perencanaan dalam memilih langkah untuk mencapai tujuan yang sudah di tetapkan.

Di sebuah madrasah badan pengelolaan pembiayaan itu biasa dilaksanakan oleh perangkat madrasah tersebut, di mana harus mengadakan rapat kepada para guru, komite, masyarakat, wali siswa, untuk kesepakatan tentang pembiayaan pendidikan yang ada disekolah tersebut. Sehingga tidak ada lagi kesimpang siuran masalah pembiayaan pendidikan yang ditetapkan. Melalui mekanisme penetapan pembiayaan pendidikan tersebut maka akan terlihat mutu manajemen madrasah dalam mengelola keuangan dan mutu pendidikan bagi siswanya.

Masyarakat di sebuah pedesaan sangat berbeda pola pikirnya dengan masyarakat yang tinggal dikota. Kalau masyarakat dipedesaan mereka lebih memilih uang sekolah yang murah dengan kualitas yang standar sedangkan

kalau dikota mereka lebih memilih kualitas yang baik untuk masalah pembiayaan pendidikan mereka tidak ambil pusing.

Menurut Jauhar (2015: 173) pembiayaan pendidikan merupakan tanggung jawab antara pemerintah dengan masyarakat, karena tanggung jawab pemerintah menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan berkelanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pembiayaan pendidikan pemerintah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan undang-undang yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Makmur dalam bukunya manajemen pembiayaan pendidikan (2020:1-2) pembiayaan sering terlupakan dalam berbagai perbincangan mengenai pendidikan. akan tetapi eksistensi dan kontribusinya berperaan cukup besar, kalau tidak ingin berkata signifikan dan menjadi kunci penting dalam mewujudkan pendidikan bermutu unggul. Memang untuk menjadi berkualitas perlu dukungan cost yang cukup, tidak hanya soal pendidikan, tetapi segala aspek kebutuhan modal dasar dan hal tersebut sarat dengan biaya.

Pembiayaan pendidikan biasanya menitik beratkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat. Biaya secara sederhana dapat dikatakan jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk belanja. Di dalam sebuah lembaga pendidikan pengelolaan pembiayaan pendidikan harus benar-benar dilakukan agar semua kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik, sehingga dapat mencapai cita-cita yang diinginkan sekolah. selain itu mutu manajemen di lembaga pendidikan memang harus dalam keadaan yang baik sehingga untuk menjadi lembaga pendidikan yang memiliki mutu semuanya harus saling bekerja sama dan memiliki rasa tanggung jawab untuk mencerdaskan anak bangsa.

5. Pembebasan Pembiayaan Pendidikan

Program Pendidikan Gratis sudah dilakukan pemerintah dengan sebutan Wajib belajar sembilan tahun, tetapi itu hanya dilaksanakan di sekolah

Negeri, sementara untuk sekolah swasta di madrasah masih ada yang dikenakan biaya sekolah belum merata pembebasan biaya sekolah. Maka dari itu peran komite sangat dibutuhkan untuk biaya operasional sekolah. Adanya dana komite merupakan pemanfaatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Pemberian subsidi pada peserta didik merupakan kebijakan publik dalam rangka memperluas akses pendidikan yang berkualitas bagi semua warga negara tanpa terkecuali. Angka putus sekolah itu lebih banyak karena masalah ekonomi yang tidak ada, peningkatan biaya membuat sulit bagi masyarakat miskin yang ingin sekolah. maka dari itu pemberian bantuan tersebut selain wajib belajar sembilan tahun pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat miskin bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan.

Hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dan orangtua siswa. kelompok masyarakat biasa donatur atau perusahaan di sekitar sekolah atau koperasi yang memberikan bantuan pada lembaga pendidikan tersebut, bantuan yang sering diterima dari masyarakat berupa alat belajar, sarana prasarana, bahkan uang tunai.

Seperti di MTs Surya Agung sekolah ini memang membebaskan bagi seluruh siswanya dari uang sekolah. sekolah hanya mengelola dana BOM dan bantuan dari donatur. MTs Surya Agung manajemen pembiayaan madrasah dalam pengelolaan keuangan madrasah bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan pembiayaan pendidikan. mendeskripsikan pelaksanaan pembiayaan pendidikan, karena yayasan dari MTs Surya Agung ini ingin anak di sekitar sekolah tersebut mendapatkan pendidikan wajib belajar sembilan tahun, sehingga anak bangsa menjadi anak yang dapat bersaing nantinya dengan negara lain, dan mendapat ilmu agama.

C. Hasil Penelitian Relevan

Untuk mempertegas penelitian ini, peneliti mencoba untuk memeriksa beberapa pemeriksaan yang mendukung dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Samiyah (2016), "*Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan Di Universitas Islam Malang (UNISMA)*", berkesimpulan bahwa:
 - a. Perencanaan anggaran pendidikan Universitas Islam Malang (UNISMA) disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT dengan menuangkan program-program beserta anggaran untuk masing-masing program. Yang diadakan pada sebulan sebelum tahun ajaran baru yang diadakan melalui musyawarah mufakat dengan melibatkan stakeholders kampus, dan keputusan rapat yang sudah di sepakati dan diputuskan oleh ketua yayasan.
 - b. Strategi Pemenuhan Pembiayaan Pendidikan di Universitas Islam Malang (UNISMA) ada empat (4) bentuk strategi yang digunakan yakni strategi unit kerja mandiri; sumbangan dana dari yayasan dan mahasiswa; memiliki link dengan luar negeri, dan pengajuan proposal kepada pemerintah.
 - c. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Universitas Islam Malang dilakukan melalui empat (4) tahap yakni evaluasi hasil kegiatan selama setahun/ persemester; evaluasi hasil kinerja pegawai melalui program-program; evaluasi dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi; evaluasi analisis SWOT meliputi hasil analisa internal dan eksternal. (Samiyah, 2016: 147).
2. Fakarotul Karimah (2018), "*Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Tahfidz Ash-Habul Kahfi Ngawi)*", berkesimpulan bahwa:
 - a. Perencanaan pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan menetapkan rencana yang menjadi prioritas, mengacu Peraturan pemerintah, perhitungannya cermat, mengoptimalkan sumber daya dan diformulasikan dengan jelas agar kelak tidak muncul pembiayaan tidak terduga.

Pendistribusiannya mengakomodir kebutuhan siswa, dan memaksimalkan fungsi manajemen perencanaan. Tim perencana terdiri dari Kepala Madrasah, Waka Sarpras, Waka Humas, Waka Kurikulum, Waka Kesiswaaan, satu guru senior, dan Ka TU/ Bendahara Madrasah. Pengorganisasian pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas sesuai keahlian tim penyusun, Waka Sarpras membidangi standar sarana dan prasarana, Waka kurikulum memegang kendali standar kompetensi lulusan dan standar penilaian, waka Humas membidangi standar pengelolaan, waka kesiswaaan membidangi standar proses, dan Ka Tu Madrasah membidangi standar pendidik dan tenaga kependidikan, Bendahara madrasah membidangi standar pembiayaan, dan salah satu guru senior membidangi standar Isi. Pembagian tersebut agar tidak tumpang tindih, dapat memprioritaskan kebutuhan, ada kerjasama tim, dan mengetahui tujuan pengorganisasian yang hendak dicapai.

- b. Actuating/aktualisasi pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti dilakukan dengan mengoptimalkan besarnya anggaran pembiayaan, hingga mencapai 100% atau mendekatinya, mengacu perencanaan yang ada, terjaganya mutu madrasah dan tertanamnya rasa keihlasan pada tim belanja barang/jasa (waka-waka, Bendahara/Ka TU), mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pengoptimalan anggaran yang tersedia. Setiap pelaksanaan realisasi selalu disertai pelaporan kegiatan dalam bentuk SPJ kegiatan.
- c. Controlling/pengawasan pembiayaan pendidikan yang ideal menurut peneliti apabila hasil pengawasan yang telah dilakukan dapat dinilai, dibandingkan, dan dievaluasi, untuk direkomendasikan guna perbaikan proses di masa mendatang. Conrolling yang ideal apabila produknya dapat diaplikasikan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dan mutu madrasah.

Controlling yang ideal adalah pengawasan vertikal dan horisontal, yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.

- d. Mutu pendidikan Islam dalam kenyataannya masih selalu dan selalu dibenahi menurut pedoman SPM yang ada. Seringkali madrasah, komite dan yayasan menjadi sasaran pertama dan utama masyarakat atau pihak pelanggan karena mungkin terlambatnya pelayanan atau ketidakmampuan madrasah untuk memenuhi sarana penunjang pendidikan yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam. (Fakarotul Karimah, 2018: 159-160)
3. Dwika Prahesti Indah Kesuma (2018), *“Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Karya Pembangunan (KP) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah.”* Berkesimpulan bahwa:
 - a. Perencanaan pengelolaan dana dalam meningkatkan sarana dan prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Karya Pembangunan (KP) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya antara lain sumber-sumber biaya pendidikan diperoleh dari: 1) SWP (shodaqoh wajib pendidikan); 2) Dana BOM; 3) Pendapatan lain-lain, seperti: retrebusi asongan, uang pendaftaran siswa baru dan siswa lama, uang bangunan dan meja kursi siswa baru, infak/shodaqoh ramadhan.
 - b. Proses perencanaan dana pendidikan melalui dua tahap yaitu, pertama melakukan identifikasi tentang sumber dana dan menetapkan anggaran perencanaan dana pendidikan. Kedua tahap ini dilaksanakan melalui rapat setiap tahun antara pihak yayasan, komite madrasah, pihak madrasah dan wali murid.
 - c. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan pengecekan atau ceklist saran dan prasarana setiap tahun terkait dengan barang yang masih layak pakai dan sudah tidak layak pakai.

- d. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan melalui beberapa langkah-langkah sebagai berikut Kepala madrasah, dewan guru dan bersama komite madrasah membentuk panitia sarana dan prasarana, Panitia pelaksana yang telah terbentuk menganalisa dan menyusun keperluan perlengkapan, Memperkirakan biaya dengan memperhatikan uang kas madrasah, Menetapkan skala prioritas menurut dana yang tersedia, Pengadaan sarana dan prasarana dengan melalui jalan pembelian dengan sumber dana yang ada di madrasah, Adanya tawar menawar (tender), hadiah atau sumbangan dan meminjam pada pihak-pihak tertentu.
- e. Pertanggungjawaban Keuangan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Karya Pembangunan (KP) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya adalah Laporan keuangan madrasah yang berupa laporan keuangan terhadap madrasah oleh bendahara madrasah dan laporan dana BOM. (Dwika Prahesti Indah Kesuma, 2018: 144-146)

Gambaran penelitian terdahulu di atas, di sini peneliti akan melihat persamaan dan kontras antara penelitian terdahulu dengan penelitian dilakukan peneliti. Untuk mempermudah memperjelas persamaan dan kontras, akan digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Perbandingan Penelitian

| Nama Peneliti dan Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Samiyah: Manajemen Pembiayaan Dalam Mutu Pendidikan Di Universitas Islam Malang (UNISMA), | 1. Penelitian berfokus pada perencanaan pembiayaan Pendidikan 2. Penelitian berfokus pada evaluasi pembiayaan pendidikan | 1. Penelitian fokus pada strategi pemenuhan anggaran untuk meningkatkan mutu pendidikan 2. Lokasi penelitian berbeda 3. Tingkat latar belakang pendidikan yang diteliti berbeda |

| | | |
|---|--|--|
| Fakarotul Karimah: “Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan (Studi Kasus di MI Tahfidz Ash-Habul Kahfi Ngawi)” | 1. Penelitian berfokus pada gambaran pelaksanaan pembiayaan pendidikan 2. Penelitian berfokus pada evaluasi pembiayaan pendidikan | 1. Penelitian berfokus pada penganggaran pembiayaan pendidikan 2. Penelitian berfokus pada kajian mutu layanan pendidikan 3. Lokasi penelitian berbeda |
| Dwika Prahesti Indah Kesuma: Strategi Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Sarana Prasarana di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Karya Pembangunan (KP) Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah. | 1. Penelitian berfokus pada perencanaan pembiayaan Pendidikan 2. Penelitian berfokus pada pelaksanaan pembiayaan Pendidikan | 1. Penelitian berfokus pada pertanggung jawaban keuangan 2. Lokasi penelitian berbeda |

Berdasarkan keterangan tabel di atas, cenderung terlihat bahwa perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penelitian ini terletak pada sasaran penelitian dan studi yang akan dibicarakan dalam penelitian, subyek, dan lokasi penelitian berbeda.